

Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Oleh Batalion Azov Ukraina Dalam Konflik Rusia-Ukraina Tahun 2014-2022

Muhammad Hilmy Nabil; Adi Joko Purwanto

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wahid Hasyim Semarang

Email: plisshealme@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses the violations committed by the Ukrainian Azov Battalion in the Russian-Ukrainian conflict in 2014 - 2022. The Azov Battalion is a volunteer army, not made by the government. The Azov Battalion was founded in March 2014 and takes its name from the coastal city of Mariupol where it is based. The Azov Battalion evolved from the Ukrajiny patriots ("Ukrainian Patriots"), a neo-Nazi paramilitary group that is a far-right organization, the Azov Battalion also known as the "Men in Black" or soldiers in all-black uniforms in the Mariupol area. The research method used in this research is descriptive qualitative, with data collection techniques based on literature study through books, journals, as well as official sources or sources available on the internet. In this study using the theory of International Humanitarian Law from Jean Pictet. According to Jean Pictet, Humanitarian Law is included in part of international public law which is applied during war or armed conflict to provide protection for people who experience suffering for their human rights as a result of armed conflict, such as civilians, members of the military who are injured, sick or prisoner during armed conflict. The results showed that the violations committed by the Azov Battalion were included in violations of international humanitarian law and these violations were then carried out through legal action through the United Nations intermediary.

Keywords: Azov Bataylon, Russia-Ukraine, International Humanitarian Law

ABSTRAK

Penelitian ini melakukan pembahasan terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Batalyon Azov Ukraina pada konflik Rusia-Ukraina tahun 2014 - 2022. Azov Battalion merupakan tentara sukarelawan, bukan buatan pemerintah. Batalion Azov didirikan pada Maret 2014 dan mengambil nama dari wilayah pesisir kota Mariupol yang menjadi markasnya. Batalion Azov berkembang dari patriot Ukrajiny ("Patriots Ukraina"), kelompok paramiliter neo-Nazi yang merupakan organisasi sayap kanan, Batalion Azov dikenal juga sebagai "Men in Black" atau tentara dalam seragam serba hitam di daerah Mariupol. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi pustaka melalui buku, jurnal, serta sumber-sumber resmi atau sumber-sumber yang tersedia di internet. Dalam penelitian ini menggunakan teori Hukum Humaniter Internasional dari Jean Pictet. Menurut Jean Pictet, Hukum Humaniter masuk ke dalam bagian dari hukum publik internasional yang penerapannya dilakukan pada saat berlangsungnya perang atau konflik bersenjata guna memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang mengalami penderitaan atas hak asasinya akibat dari konflik bersenjata, seperti penduduk sipil, anggota militer yang terluka, sakit atau tawanan semasa konflik bersenjata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Batalion Azov termasuk ke dalam pelanggaran hukum humaniter internasional dan pelanggaran ini kemudian dilakukan penindakan secara hukum melalui perantara Perserikatan Bangsa-bangsa.

Kata kunci: *Bataylon Azov, Rusia-Ukraina, Hukum Humaniter Internasional*

PENDAHULUAN

Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 membuat penduduk Ukraina terbagi menjadi dua bagian, Timur dan Barat. Jatuhnya Uni Soviet juga membuat Ukraina memiliki dua etnis identitas pada satu negara yakni masyarakat Rusia yang berada di Timur dan Selatan dan Ukraina di wilayah Barat. Masyarakat yang tinggal di sekitar barat Ukraina menyebut mereka Ukrainian dan di sebelah Timur dan Selatan khususnya Crimea menyebut diri mereka Russia.¹ Ukraina termasuk negara di wilayah Eropa Timur yang langsung berbatasan dengan negara-negara Uni-Eropa dan rekan kerjasama di wilayah Timur.

Peristiwa mundurnya Viktor Yanukovich pada tahun 2014 dari tahta presiden dengan menarik diri dari kesepakatan yang telah dirancang dengan Uni-Eropa mengenai perjanjian perdagangan dan «invasi» Rusia di wilayah timur Ukraina serta Crimea menjadi awal mula konflik Rusia – Ukraina.² Peristiwa tersebut menciptakan krisis Ukraina dan munculnya kondisi yang tidak stabil di wilayah perbatasan Ukraina yaitu Luhansk dan Donetsk. Ukraina melawan kelompok separatis yang di dukung Rusia. Tidak hanya pasukan resmi Ukraina dan kelompok separatis yang sedang berperang, melainkan ada beberapa kelompok relawan yang berbagi kepentingan dengan Ukraina guna menghancurkan separatis secara seksama. Azov Battalion muncul sebagai salah satu gerakan nasionalis relawan sayap kanan. Kelompok sukarelawan melakukan perlawanan terhadap separatis, sama dengan militer negara Ukraina.

Dampak pembatalan perjanjian oleh Yanukovich memicu ketegangan sampai muncul konflik baru yakni krisis Ukraina. Crimea menjadi tragedi dimana militer Rusia, masyarakat pro-Rusia, dan separatis melawan militer Ukraina maupun pasukan milisi sukarelawan yang melakukan peperangan.³ Crimea adalah bagian resmi dari Ukraina yang membentang dari selatan Ukraina antara Laut Hitam dan Laut Azov. Rusia ingin mengklaim wilayah Crimea dengan memunculkan bukti dan laporan dari masyarakat Ukraina pro-Rusia yang berupa pangkalan militer di Crimea, dan perjanjian yang ada dengan Ukraina mengenai kepemilikan Crimea.⁴ Selain itu, Vladimir Putin melakukan intervensi militer ke wilayah Crimea untuk melindungi etnis Rusia yang berada di Crimea.

Rusia memasuki wilayah perbatasan Timur Ukraina. Sekitar 40.000 tentara Rusia berkumpul di perbatasan Ukraina, kota-kota Timur Donetsk, Kharkiv dan Luhansk dengan intervensinya. Hashtag anti Maidan merupakan gerakan penolakan yang digunakan oleh masyarakat pro-Rusia kepada pemerintahan Ukraina pada 2014. Masyarakat pro-Rusia yang melakukan demonstrasi sebenarnya tidak hanya terjadi di wilayah Donetsk, akan tetapi di Crimea dan sekitarnya. Melihat dari peristiwa yang terjadi masyarakat pro-Rusia menolak pemerintahan karena menurunkan militernya yang mengancam masyarakat disana, serta dengan masyarakat Timur Ukraina memiliki kesetiaan kepada Viktor Azov Batalion didirikan

¹ "Ukraine Census 2001," accessed April 17, 2022, [http://2001.ukrcensus.gov.ua/eng/results/gen eral/nationality/](http://2001.ukrcensus.gov.ua/eng/results/gen%20eral/nationality/).

² Aljazeera, "Russia Cut \$15B Gas," accessed April 17, 2022, Russia cut \$15B gas.

³ Radityo Fikri Morteza*, Joko Setiyono, and Nuswantoro Dwiwarno, "PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO (COMMAND RESPONSIBILITY) DALAM KEJAHATAN PERANG OLEH BATALYON AIDAR DI UKRAINA," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (October 11, 2016): 1–20, <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.13729>.

⁴ Morteza*, Setiyono, and Dwiwarno.

pada Maret 2014 dan mengambil nama dari wilayah pesisir kota Mariupol yang menjadi markasnya. Azov Batalion berkembang dari patriot Ukrayíny, kelompok paramiliter neo-Nazi yang merupakan organisasi sayap kanan, Azov Battalion dikenal juga sebagai «Men in Black» atau tentara dalam seragam serba hitam di daerah Mariupol.

KERANGKA KONSEPTUAL

Hukum Humaniter Internasional

Dalam sebuah peperangan terdapat hukum yang mengatur sebagai salah satu bagian dari hukum publik internasional yang memiliki keterkaitan terhadap keberadaan hukum internasional dalam mengatur permasalahan masyarakat dunia dari setiap perang dan konflik bersenjata. Kajian terkait hukum humaniter wajib diketahui dan dipahami oleh setiap anggota militer dalam bertugas dan dalam berkonflik senjata. Penerapan hukum humaniter memiliki hubungan dengan permasalahan yang terjadi di dalam perang.

Menurut Jean Pictet, Hukum Humaniter masuk ke dalam bagian dari hukum publik internasional yang penerapannya dilakukan pada saat berlangsungnya perang atau konflik bersenjata guna memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang mengalami penderitaan atas hak asasinya akibat dari konflik bersenjata, seperti penduduk sipil, anggota militer yang terluka, sakit atau tawanan semasa konflik bersenjata.⁵ Di sisi lain, hukum humaniter melindungi dengan khusus obyek sipil yang digunakan rakyat dan tidak memberikan dukungan atas kepentingan militer atau obyek netral dalam sebuah perang seperti cagar budaya, sekolah, dan tempat ibadah.

Hukum humaniter memiliki sumber utama yaitu *law making treaties (conventions)* dan *costums* (kebiasaan). HHI didasarkan pada keseimbangan antara pertimbangan kepentingan militer dan kemanusiaan. Di sisi lain, HHI juga menegaskan bahwa kepentingan militer tidak memberi kesempatan kepada pihak yang berperang untuk mengobarkan perang yang tidak terbatas.⁶ Dalam pasal 57 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa pun dijelaskan bahwa obyek yang dapat diserang dalam suatu konflik bersenjata adalah obyek militer dan kombatan.⁷

Jatuhnya korban sipil dan sasaran serangan terhadap obyek sipil termasuk infrastruktur dan obyek vital lainnya harus dihindari. Sebaliknya, pertimbangan kemanusiaan memberikan batasan-batasan tertentu mengenai alat dan metode peperangan, dan mewajibkan mereka yang telah jatuh ke tangan musuh agar diperlakukan secara manusiawi setiap saat. Keseimbangan antara kepentingan militer dan kemanusiaan diungkapkan secara lebih spesifik.

⁵ Teguh Sulistia, "Pengaturan Perang Dan Konflik Bersenjata Dalam Hukum Humaniter Internasional," *Indonesian Journal of International Law* 4, no. 3 (August 12, 2021), <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.3.157>.

⁶ ICRC, "Military Necessity," accessed April 18, 2022, https://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/military-necessity.

⁷ Ho, Hengky, "Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel," 2019, <https://doi.org/10.35796/les.v7i2.24668>.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran yang Dilakukan Oleh Battalion Azov pada Konflik Rusia-Ukraina Tahun 2014 – 2022

Konflik Rusia-Ukraina telah terjadi sejak tahun 2014 setelah peristiwa kemunduran Presiden Viktor Yanukovich dengan terjadinya penolakan association agreement Uni Eropa dan invasi yang dilakukan oleh Ukraina sehingga memunculkan ketegangan di wilayah perbatasan Ukraina yaitu Donetsk dan Luhansk. Invasi Rusia ke Ukraina yang dilakukan atas perintah Presiden Vladimir Putin guna memberikan perlindungan terhadap penduduk perbatasan yang berbahasa Rusia dari kejahatan genosida di tangan «neo-Nazi». Kemudian, Battalion Azov diintegrasikan pada Garda Nasional Ukraina. Berjalannya waktu, Battalion Azov memiliki kecenderungan neo-Nazi. Namun, Battalion Azov melakukan operasi sebagai entitas yang otonom. Battalion Azov merupakan sekelompok tentara sukarelawan yang terbentuk sendirinya tanpa campur tangan pemerintah. Namun, seiring berjalannya waktu Battalion Azov melakukan kejahatan perang yang membuat mereka melanggar hukum humaniter internasional. Berikut beberapa pelanggaran hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh Batalion Azov:

1. Battalion Azov menciptakan sebuah langkah yang dinilai offensive dengan melakukan pembentukan tentara anak. Battalion Azov mengemukakan alasannya dalam pembuatan ini ialah sebagai pembentukan Ukraina era baru, patriotisme yang memiliki kesiapan dalam berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan dan pertahanan Ukraina. Battalion Azov merupakan pengikut dari Hitler Ukraina subdivisions SS dan pro-Hitler organisasi Ukraina Nationalist «OUN» yang merupakan sebuah organisasi yang melakukan penyiksaan terhadap masyarakat sipil selama Perang Dunia II berlangsung. Batalion Azov memiliki anggapan bahwa mereka merupakan pengikut Nazi Jerman dengan mencontoh pada divisi schutzstaffel dan OUN dalam melakukan penyiksaan. Batalion Azov melakukan pemukulan dan pengancaman kekerasan terhadap istri dan anak perempuan. Selain itu, Batalion Azov juga menangkap dan menyiksa serta memberikan ancaman kepada German Mandrikov yang merupakan masyarakat sipil. Penyiksaan yang dilakukan oleh Batalion Azov dengan cara penyerangan fisik dan psikologi melalui penyengatan menggunakan listrik, memblok akses oksigen dengan menutup kepala German Mandrikov menggunakan kantong plastik, dan melakukan pemukulan pada bagian tubuh kaki menggunakan besi.⁸

Batalion Azov melakukan kerja sama dengan Dinas Keamanan Rusia (SBU) guna melancarkan penangkapan di wilayah tersebut tanpa melihat siapa yang ditangkap hingga melakukan siksaan terhadap masyarakat sipil dan tawanan perang.⁹ Padahal Ukraina terikat dengan Hukum Humaniter Internasional yang sejatinya itu juga

⁸ Faiz Fadhlurrahman, Reni Windiani, and Mohamad Rosyidin, "KEJAHATAN PERANG AZOV BATTALION DALAM KONFLIK RUSIA-UKRAINA 2014: PERSPEKTIF KONSTRUKTIVIS," *Journal of International Relations Universitas Diponegoro* 3, no. 1 (January 1, 2017): 10–18, <https://doi.org/10.14710/jirud.v3i1.14581>.

⁹ Ho, Hengky, "PENERAPAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA PALESTINA DAN ISRAEL."

menciderai Hukum Humaniter Internasional yaitu Geneva I sampai IV. Konvensi ini membahas mengenai perlindungan korban konflik bersenjata. Kejahatan perang Batalion Azov ini juga menciderai konvensi Geneva III, perlakuan terhadap tawanan perang.

2. Battalion Azov membentuk Azovets atau kemah musim panas dengan berkegiatan melatih dan melakukan doktrin militeristik terhadap anak di bawah umur.¹⁰ Padahal Pemerintah Ukraina telah membuat aturan mengenai perekrutan tentara militer harus berusia di atas 15 tahun dan sudah diadopsi oleh Ukraine Militray Services Law 1992. Selain melanggar peraturan perekrutan tentara oleh Pemerintah Ukraina, Batalion Azov juga menciderai Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa yang membahas tentang tidak diperbolehkannya bagi anak-anak ikut andil dalam suatu konflik bersenjata dan larangan pada perekrutan anak dibawah umur Konvensi ini telah diratifikasi pada 25 Januari 1950.
3. Battalion Azov melakukan penyerangan dan penghancuran terhadap sebuah kamp Romani di Kyiv setelah penduduk mengalami kegagalan melakukan penanggapan atas ultimatum mereka untuk meninggalkan daerah tersebut dalam waktu 24 jam. Hal ini berdasar pada lapran yang di dapatkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada tahun 2018. Gerakan dari Battalion Azov yang memberikan pelatihan perang kepada pejuang asing yang memanfaatkan seruan dari Zelensky untuk penerimaan sukarelawan asing bergabung ke dalam pertempuran yang memunculkan kekhawatiran terjadinya ekstremisme berbasis pengalaman tempur dan pelatihan bersenjata yang akan digunakan untuk melakukan serangan teroris.¹¹

Terdapat bukti bahwa anggota Battalion Azov memiliki keterlibatan dalam permusuhan dengan rakyat Donbas. Tidak hanya terlibat dalam permusuhan tersebut, namun juga terlibat dalam kasus penculikan, penyiksaan hingga penjarahan secara masal. Hal ini dilaporkan oleh Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia pada 2016.¹² Rusia terus melakukan operasi khusus ke Ukraina khususnya di wilayah Battalion Azov. Dalam operasi ini ditemui penerapan yang dilakukan oleh Battalion Azov seperti penerapan hukuman mati tanpa pengadilan, kekerasan fisik, hingga penghancuran identitas. Salah satu bentuk penghancuran identitas ini dilakukan dengan mengikat masyarakat sipil ke tiang listrik atau pohon menggunakan isolasi dan tidak jarang juga melakukan pengecatan terhadap wajah mereka dan melukai fisik dengan mencambuk serta membiarkan masyarakat sipil merasa kedinginan.¹³ Tidak hanya berhenti hingga hal tersebut, namun juga dilakukan penyebaran foto-foto korban

¹⁰ Fadhurrakhman, Windiani, and Rosyidin, "2. KEJAHATAN PERANG AZOV BATTALION DALAM KONFLIK RUSIA-UKRAINA 2014."

¹¹ John, Tara and Lister, Tim, "A Far-Right Battalion Has a Key Role in Ukraine's Resistance. Its Neo-Nazi History Has Been Exploited by Putin," *CNN World*, March 30, 2022, <https://edition.cnn.com/2022/03/29/europe/ukraine-azov-movement-far-right-intl-cmd/index.html>.

¹² Ariyani, Titik, "Pantas Mati-Matian Dibenci Rusia, Terungkap Batalion Azov Lakukan Kejahatan-Kejahatan Yang Sengaja Ditutupi Barat Ini," *Intisari News*, March 30, 2022, <https://intisari.grid.id/read/033211142/pantas-mati-matian-dibenci-rusia-terungkap-batalion-azov-lakukan-kejahatan-kejahatan-yang-sengaja-ditutupi-barat-ini?page=all>.

¹³ Laelani, Rizki, "Tindakan Sadis Azov Neo-Nazi Yang Diakui Terlarang Tapi Dibiarkan Barat-AS Bahkan Dipersenjatai Sumber Artikel Berjudul 'Tindakan Sadis Azov Neo-Nazi Yang Diakui Terlarang Tapi Dibiarkan Barat-AS Bahkan Dipersenjatai,'" *Pikiran Rakyat*, March 27, 2022, <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-014088749/tindakan-sadis-azov-neo-nazi-yang-diakui-terlarang-tapi-dibiarkan-barat-as-bahkan-dipersenjatai>.

dan rekaman hukuman di jejaring sosial media. Dari hasil operasi yang dilakukan, ditemui sekitar 150.000 masyarakat sipil di sandera oleh Battalion Azov di Mariupol.

B. Penegakan Hukum Humaniter Internasional terhadap Pelanggaran Battalion Azov pada Konflik Rusia-Ukraina Tahun 2022

1. Jalur Internasional melalui International Criminal Court (ICC) dan Statuta Roma

International Criminal Court

International Criminal Court (ICC) adalah suatu Organisasi Internasional Independen yang tidak bergabung dalam bagian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).¹⁴ Markas dari ICC ini terletak di Kota Den Haag, Belanda yang memiliki fungsi sebagai suatu pengadilan permanen guna menuntut individual dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, maupun genosida. ICC ini menjadi pengadilan paling final yang mana tidak akan menangani kasus jika kasus telah atau sedang diselidiki atau dituntut oleh sistem peradilan nasional kecuali proses yang dilakukan hanya untuk melindungi seseorang dari tanggung jawab pidana atau bisa disebut proses yang dilakukan tidak asli. Hal ini mengartikan bahwa ICC didirikan dengan tujuan untuk mengakhiri kekebalan hukum bagi para pelaku kejahatan paling serius yang menjadi perhatian oleh Masyarakat Internasional.

Pada setiap kegiatannya, ICC selalu memperhatikan standar tertinggi keadilan dan proses pengadilan. Yuridiksi dan fungsi ICC sendiri diatur oleh Statuta Roma yang merupakan hasil Konferensi Internasional di Roma Italia pada Juni 1998 (diadopsi 17 Juli 1998).¹⁵ ICC ini merupakan Lembaga yang tidak dibiayai oleh negara-negara, akan tetapi selalu terdepan dalam menerima kontribusi atau partisipasi dari suatu Negara, Pemerintah, Organisasi Internasional, Individu korporasi dan lain-lain. Organisasi ICC ini telah resmi diadopsi oleh 120 negara.¹⁶

ICC diatur oleh Majelis Negara Pihak atau manajemen pengawas pengadilan dan badan legislative yang tersusun dari perwakilan tiap-tiap Negara. Majelis Negara Pihak yang terdiri dari empat organ, yaitu Kepresdidenan, Divisi, Yudisial, Kantor Kejaksaan dan Registrasi. Selain itu, Pengadilan juga mencakup sejumlah kantor seperti Kantor Penasihat Umum bagi korban dan Kantor Penasihat Umum Pertahanan. Kantor ini berada di bawah Registrasi untuk keperluan administrasi.

Pihak Negara maupun Dewan Keamanan PBB dapat merujuk situasi kejahatan dalam yuridiksi ICC. Dengan kata lain melalui para penegak hukum di ICC hanya memiliki kewenangan untuk menyelidiki kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi di Negara-negara yang meratifikasi Statuta Roma yang dapat diperkarakan apabila Negara yang bersangkutan menginginkan kasusnya untuk dibawa keranah hukum. Kemudian jaksa mengevaluasi informasi yang tersedia dan mulai melakukan penyelidikan kecuali jaksa memutuskan bahwa tidak ditemukan dasar yang memadai

¹⁴ ICC, "Understanding the International Criminal Court," n.d.

¹⁵ "Division, Pre-Trial - Structure of the Court," n.d., <http://www.iccpi.com>.

¹⁶ ICC, "Understanding the International Criminal Court."

untuk melakukan penyelidikan. Dalam melakukan penyelidikan, ia menerima dan menganalisis informasi yang disampaikan oleh berbagai sumber terpercaya.¹⁷

Pendirian ICC dilatarbelakangi untuk menangani konflik-konflik penyebab terjadinya kasus-kasus peperangan. Konflik sendiri dipandang sebagai hal yang begitu sangat merugikan karena menimbulkan adanya korban juga kerugian yang cukup besar, baik jiwa maupun materi. Yang disayangkan adalah, kerugian turut serta dirasakan oleh pihak-pihak yang tidak bersalah, terutama pada Masyarakat sipil dan anak-anak yang tinggal di daerah konflik. Kemudian ICC dibentuk salah satu alasannya karena banyak terjadi kasus mudurnya kepercayaan para korban kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap kinerja pemerintahan suatu Negara konflik, sehingga dibentuklah ICC guna dijadikan para korban sebagai solusi lain dalam menyelesaikan konflik yang dihadapi.

Statuta Roma

Statuta Roma merupakan sebuah perjanjian internasional untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) yang berfungsi untuk mengadili tindak kejahatan kemanusiaan dan memutus rantai kekebalan hukum (*impunity*). Statuta Roma, sebagai salah satu Langkah penting dalam proses penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), telah disetujui dalam konferensi Diplomatik Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 17 Juli 1998. Dari 148 negara peserta konferensi, sebanyak 120 negara mendukung, 7 negara menentang dan 21 negara lainnya abstain.¹⁸

Setidaknya ada empat jenis tindak pelanggaran serius yang menjadi perhatian internasional, yaitu *genocide* (genosida), *crime against humanity* (kejahatan terhadap kemanusiaan), *war crimes* (kejahatan perang) dan *aggression* (kejahatan agresi). Statuta Roma juga menjelaskan beberapa hal tentang struktur mahkamah, jenis pelanggaran, penyelidikan dan penuntutan, persidangan dan hukuman serta beberapa hal penting lainnya. Beberapa mahkamah yang telah dibentuk untuk berbagai kasus pelanggaran berat HAM yaitu *International Criminal Tribunal for Yugoslavia* (ICTY), dibentuk pada tahun 1993 dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR), dibentuk oleh Dewan Keamanan pada tahun 1994.

Ratifikasi Statuta Roma

Ukraina tidak merupakan negara anggota Statuta Roma, tetapi telah dua kali menggunakan hak prerogatifnya untuk menerima yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas kejahatan yang diduga terjadi di wilayahnya, sesuai dengan Pasal 12 (3) Statuta Roma.¹⁹

Pada 28 Februari 2022, Jaksa ICC mengumumkan bahwa ia akan meminta izin untuk membuka penyelidikan terhadap Situasi di Ukraina, berdasarkan kesimpulan awal dari pemeriksaan pendahuluan Kantor ICC, dan mencakup setiap kejahatan yang diduga baru yang masuk dalam yurisdiksi Mahkamah. Pada 2 Maret 2022, Kantor ICC menerima rujukan dari 43 negara anggota ICC dan membuka penyelidikan terhadap

¹⁷ ICC.

¹⁸ "Rome Statute of International Criminal Court" (International Criminal Court, July 17, 1998).

¹⁹ International Criminal Court, "Situation in Ukraine," Official Organization Website, n.d., <https://www.icc-cpi.int/situations/ukraine>.

Situasi di Ukraina. Penyelidikan ini mencakup tuduhan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida yang dilakukan di bagian mana pun di wilayah Ukraina oleh siapa pun sejak 21 November 2013. Meskipun Ukraina bukan negara anggota Statuta Roma dan tidak pernah meratifikasinya. Yang dilakukan oleh Batalyon Azov merupakan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mana sesuai dengan definisi kejahatan perang yang ditetapkan dalam Konvensi Jenewa tentang Hukum dan Kebiasaan Perang (*Laws and Customs of War*), yang mana secara strukturnya juga jelas melanggar aturan yang ada dalam statuta roma pasal 7 tentang kejahatan terhadap manusia, yang dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil.

Rusia diketahui menandatangani Statuta Roma yang membentuk ICC pada tahun 2000, tetapi tidak pernah meratifikasi perjanjian untuk menjadi anggota. Kepala bagian politik dan bilateral Kedubes Rusia, Roman Romanov, menyatakan bahwa negaranya tidak mengakui yurisdiksi dari ICC. Berdasarkan situs *United Nations Treaty Collection*, Rusia dulu pernah tanda tangan statuta itu, namun mengumumkan keluar dari ICC pada 2016. Presiden Rusia Vladimir Putin menyetujui perintah untuk menarik negaranya dari proses bergabung dengan ICC. Ukraina juga ternyata juga tak ikut tanda tangan Statuta Roma. Namun, situs *Center for Strategic and International Studies (CSIS)* menjelaskan bahwa Ukraina telah mengakui yuridiksi ICC sejak 2015.²⁰

Apakah Batalyon Azov melanggar statuta Roma?

Badan hukum yang mendefinisikan kejahatan perang adalah Konvensi Jenewa, Hukum dan Kebiasaan Perang (*Laws and Customs of War*), dan, dalam beberapa kasus ad hoc, ketetapan lembaga-lembaga seperti Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia dan untuk Rwanda. Kejahatan yang dilakukan Batalyon Azov seperti melakukan pembunuhan, penyiksaan terhadap masyarakat sipil serta penganiayaan secara kemanusiaan memang melanggar beberapa pasal yang termuat dalam Statuta Roma Pasal 7 tentang Kejahatan terhadap Kemanusiaan dan Pasal 8 tentang Kejahatan Perang.

2. Jalur Nasional

Kekhawatiran atas tersebarnya kekerasan di Ukraina yang ditimbulkan oleh Battalion Azov terhadap masyarakat sipil dan tawanan perang semakin meningkat. Divisi kemanusiaan yang menjadi tidak efektif dan terus mengalami peningkatan hingga semakin memperparah keadaan. Jutaan nyawa telah gugur dalam konflik ini yang terjadi akibat konflik dan pelanggaran yang dilakukan oleh Battalion Azov. Perlindungan terhadap sipil oleh Ukraina dan Federasi Rusia yang belum menjangkau

²⁰ Rony, Tommy K., "Respons Kedubes Rusia Soal Perintah Mahkamah Pidana Internasional Yang Ingin Tangkap Vladimir Putin: Ini Tak Bisa Diterima," *Liputan6*, April 13, 2023, <https://www.liputan6.com/global/read/5259654/respons-kedubes-rusia-soal-perintah-mahkamah-pidana-internasional-yang-ingin-tangkap-vladimir-putin-ini-tak-bisa-diterima?page=2>.

upaya kemanusiaan ini, mengakibatkan kurangnya keamanan bagi masyarakat sipil yang ingin menyelamatkan diri sejak konflik 24 Februari.²¹

Federasi Rusia bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa terus melakukan penyorotan terhadap bidang-bidang prioritas terhadap Ukraina untuk terus memperhatikan kehati-hatiannya dalam upaya penyelamatan terhadap masyarakat sipil. Dalam pertemuan bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa, Federasi Rusia menyatakan bahwa kaum radikal dan neo-Nazi yang tidak termasuk dalam angkatan bersenjata telah melakukan penahanan sandera dan memanfaatkan masyarakat sipil sebagai perisai manusia.²²

Akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Batalion Azov, komandan atas Batalion Azov bertanggung jawab dalam kasus pelanggaran terhadap tawanan perang Rusia dimana anggota Batalion Azov melakukan penyiksaan terhadap tawanan perang. Hal ini didakwakan secara *in absentia* berdasarkan pasal 317 KUHP Rusia.²³ Pemerintah Rusia terus melakukan tindakan pelacakan dan penangkapan terhadap komandan Battalion Azov. Tidak hanya penyiksaan, namun terjadi pelecehan terhadap tawanan perang Rusia yang terunggah ke internet. Oleh karena itu, Human Rights Watch Amerika Serikat mendesak Ukraina untuk tidak melakukan pengunggahan video yang mengandung pengintimidasian terhadap tawanan perang. Hal ini di nilai melanggar perlindungan yang berdasarkan pada Konvensi Jenewa atas perlakuan yang menyangkut martabat terhadap kombatan yang ditangkap di seluruh sisi.²⁴

Pada 20 Mei 2022, dilakukan operasi penukaran mayat dan tentara hidup dari Battalion Azov dengan Rusia. Atas seluruh pelanggaran yang dilakukan oleh Battalion Azov, Rusia terus menggugat pada Kantor Kejaksaan Agung Federasi Rusia guna mengakui Battalion Azov sebagai organisasi teroris. Terkait pengakuan ini, pengacara Rusia mengatakan bahwa terdapat kemungkinan militan Battalion Azov untuk ditangkap dan dilakukan pendakwaan atas pelanggaran yang telah dilakukan berdasarkan Pasal 205.5 KUHP Rusia tentang keterlibatan dalam kegiatan organisasi semacam teroris. Apabila gugatan ini di setujui oleh Mahkamah Agung Federasi Rusia, maka setiap anggota Battalion Azov akan menerima hukuman penjara selama 10-20 tahun. Sedangkan, penyelenggara dan komandan Battalion menerima hukuman selama 15-20 tahun.²⁵

Peradilan terhadap Battalion Azov dilaksanakan di Pengadilan Militer Distrik Selatan di Rostov-on-Don kepada 22 prajurit Battalion Azov atas tuduhan gerakan terorisme. Diantara seluruh terdakwa termasuk delapan wanita di dalamnya yang memiliki tugas sebagai juru masak. Seluruh terdakwa mulai ditahan pada Maret 2022 pada saat melakukan percobaan melintasi pos pemeriksaan di pinggiran kota selama kemunduran pasukan Ukraina.²⁶ Dakwaan yang diberikan adalah tuduhan atas

²¹ UN Press, "Alarmed by Targeted Attacks on Civilians Fleeing Violence, Massive Humanitarian Crisis in Ukraine, Speakers Briefing Security Council Reiterate Strong Calls to End Conflict," *United Nations*, March 7, 2022, <https://press.un.org/en/2022/sc14823.doc.htm>.

²² UN Press.

²³ Iyabu, Ahmad Fauzi, "Berhasil Diidentifikasi, Dua Komandan Batalion Azov Ukraina Diburu Terkait Penganiayaan Delapan Tahanan Perang Rusia," April 17, 2022, <https://voi.id/berita/155054/berhasil-diidentifikasi-dua-komandan-batalion-azov-ukraina-diburu-terkait-penganiayaan-delapan-tahanan-perang-rusia>.

²⁴ Iyabu, Ahmad Fauzi.

²⁵ Jurist Staff, "Ukraine Dispatch: Russia Wants to Put Some Captured Azov Soldiers on Trial, but They Are Ukrainian Heroes," *JURIST*, July 15, 2022.

²⁶ *Ibid*,

kelompok terorganisir atau kelompok kriminal, mengikuti pelatihan guna melakukan kegiatan teroris, hingga melakukan pelanggaran batas atas kehidupan seorang negarawan. Jaksa penuntut umum menyatakan bawa dua dari dua puluh empat terdakwa dilakukan penukaran dan tidak akan mengikuti proses selanjutnya. Sehingga, tersisa dua puluh dua orang untuk melakukan sidang peradilan pada 28 Juni.²⁷

Selain melalui penindakan secara hukum, menanggapi pelanggaran yang dilakukan oleh Battalion Azov dilakukan penyitaan terhadap seluruh persenjataan yang dimiliki oleh Battalion Azov di wilayah Mariupol. Tidak hanya penyitaan terhadap persenjataan namun juga penyerahan anggota Battalion Azov. Rusia melakukan penahanan di Mariupol sejak tanggal 16 Mei.²⁸ Atas pelanggaran yang dilakukan oleh Battalion Azov, pemerintah Ukraina memberikan penawaran atas jaminan bahwa tentara yang ditahan dapat kembali melalui pertukaran. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky mengharapkan dalam upaya penyelamatan nyawa para prajurit. Disisi lain, ketua Komite Duma untuk Urusan Internasional memberikan saran untuk melakukan pengadilan terhadap Battalion Azov dengan memberikan hukuman mati.²⁹ Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 Pasal 13 tentang perlakuan terhadap tawanan perang bahwa memperlakukan tawanan perang harus tetap secara manusiawi. Pelarangan atas tindakan atau kelalaian yang menjadi pelanggaran hukum oleh Negara Penahan yang mengakibatkan sebuah kematian atau permasalahan yang berbahaya terhadap kesehatan tawanan perang.³⁰

Selain penindakan atas Rusia, Amerika Serikat juga melakukan pelarangan atas penggunaan bantuan militer dari Amerika Serikat. Meninjau seluruh pelanggaran yang dilakukan oleh Battalion Azov sampai pada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian pihak Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Battalion Azov termasuk kedalam pelanggaran hak asasi manusia.³¹

Perserikatan Bangsa-bangsa dalam konflik ini memiliki posisi sebagai pemantau dan penerima laporan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Battalion Azov. Pertama, Perserikatan Bangsa-bangsa mengambil langkah dengan melakukan pengiriman divisi untuk melaksanakan misi pemantauan dan penegakan guna mencapai perdamaian di daerah konflik. Pemantauan dilakukan terhadap kondisi keamanan dan wajib melaporkan terjadinya pelanggaran atas hak asasi manusia yang dilakukan oleh Battalion Azov.³²

²⁷ Kini, Kala, "Di Rostov-on-Don, Persidangan 22 "Azovites" Dimulai. Kantor Presiden Ukraina Menyebut Persidangan Ini Sebagai "kejahatan Perang," accessed June 15, 2023, currenttime.tv.

²⁸ Wardhana, Esnoe Faqih, "Resimen Azov Yang Menyerah Menanti Nasib, Akankah Dihukum Mati Rusia?," *SindoNews*, Mei 2022, <https://international.sindonews.com/read/776677/41/resimen-azov-yang-menyerah-menanti-nasib-akankah-dihukum-mati-rusia-1653231919>.

²⁹ Wardhana, Esnoe Faqih.

³⁰ Wardhana, Esnoe Faqih.

³¹ Ravianto, "Mengenal Batalyon Azov, Jangkar Ukraina Dalam Menghadapi Gempuran Rusia, Dibentuk Raja Energi Mengenal Batalyon Azov, Jangkar Ukraina Dalam Menghadapi Gempuran Rusia, Dibentuk Raja Energi," *Tribun Jabar*, March 23, 2022, <https://jabar.tribunnews.com/2022/03/23/mengenal-batalyon-azov-jangkar-ukraina-dalam-menghadapi-gempuran-rusia-dibentuk-raja-energi>.

³² Ravianto.

Selain itu, Perserikatan Bangsa-bangsa melaksanakan langkah diplomasi dan mediasi yang dilakukan antara pemerintah Ukraina dan Battalion Azov dengan tujuan untuk dapat menyelesaikan konflik secara damai, pengurangan eskalasi konflik, serta mendorong penghormatan terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia.³³ Ketiga, Perserikatan Bangsa-bangsa memberikan bantuan advokasi Hak Asasi Manusia. Perserikatan Bangsa-bangsa memberikan bantuan serta dukungan terhadap pemerintah Ukraina sebagai penguatan sistem hukum dalam melindungi hak asasi manusia. Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mampu memberikan advokasi dan saran secara teknis guna melakukan peningkatan perlindungan hak asasi manusia dan sebagai penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Battalion Azov. Keempat, pemberian sanksi dan pembatasan. Dewan Keamanan PBB dapat menerapkan sanksi atau restriksi terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam pelanggaran serius terhadap hukum internasional, termasuk Batalyon Azov, jika terbukti melanggar prinsip-prinsip PBB dan hak asasi manusia. Sanksi ini dapat mencakup pembekuan aset, larangan perjalanan, atau embargo senjata.³⁴

Berdasarkan hukum internasional, pelanggaran yang dilakukan oleh Battalion Azov merupakan konteks pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hukum internasional yang mengatur terkait pelanggaran ini mencakup (1) Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan. Dalam konvensi ini mengatur terkait perlindungan terhadap korban dalam situasi konflik bersenjata. Apabila terbukti bahwa Battalion Azov melakukan pelanggaran atas hak asasi manusia hal ini dapat diajukan tuntutan hukum pada hukum internasional. (2) Hukum Kesalahan Perang dan hak asasi manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa dalam peristiwa konflik Rusia-Ukraina yang memunculkan terjadinya pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan oleh Battalion Azov dapat dilihat melalui teori hukum humaniter internasional menurut Jean Pictet bahwa pada saat berlangsungnya perang atau konflik bersenjata harus dilindungi oleh hukum publik internasional terhadap orang-orang yang mengalami penderitaan atas hak asasinya akibat dari terjadinya konflik bersenjata, seperti penduduk sipil, anggota militer selama konflik bersenjata berlangsung.

Dalam konflik Rusia-Ukraina tahun 2014 - 2022 menunjukkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Battalion Azov yang berasal dari Ukraina. Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Battalion Azov diantaranya ekstremisme sayap kanan yang berkaitan dengan ideologi mereka yang mengikuti neo-Nazi dan berpacu pada Hitler. Battalion Azov memiliki anggapan bahwa mereka merupakan pengikut Nazi Jerman dengan mencontoh pada divisi *schutzstaffel* dan OUN dalam melakukan penyiksaan. Nilai-nilai neo-Nazi yang terdapat pada Battalion Azov tertuang dalam tindakan penyiksaan masyarakat sipil ataupun tahanan perang. Battalion Azov melakukan pemukulan dan pengancaman kekerasan

³³ Ibid,

³⁴ Ravianto, "Mengenal Batalyon Azov, Jangkar Ukraina Dalam Menghadapi Gempuran Rusia, Dibentuk Raja Energi Mengenal Batalyon Azov, Jangkar Ukraina Dalam Menghadapi Gempuran Rusia, Dibentuk Raja Energi,."

terhadap istri dan anak perempuan. Selain itu, Battalion Azov juga menangkap dan menyiksa serta memberikan ancaman kepada German Mandrikov yang merupakan masyarakat sipil. Penyiksaan yang dilakukan oleh Battalion Azov dengan cara penyerangan fisik dan psikologi melalui penyengatan menggunakan listrik, memblok akses oksigen dengan menutup kepala Germa Mandrikov menggunakan kantong plastik, dan melakukan pemukulan pada bagian tubuh kaki menggunakan besi.

Adapun penindakan yang diambil secara tegas akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Battalion Azov ialah diantaranya para anggota Battalion Azov dikenakan pasal 317 dan 205.5 KUHP Rusia. Kemudian juga dikenakan atas dasar Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan. Dalam konvensi ini mengatur terkait perlindungan terhadap korban dalam situasi konflik bersenjata. Apabila terbukti bahwa Battalion Azov melakukan pelanggaran atas hak asasi manusia hal ini dapat diajukan tuntutan hukum pada hukum internasional. Hukum kesalahan perang dan hukum hak asasi manusia seperti penggunaan Hukum Humaniter Internasional yang disesuaikan dengan yuridiksi nasional dan lembaga hukum internasional, penindakan melalui pengadilan internasional, dan memperoleh sanksi internasional khususnya berasal dari anggota negara-negara PBB terhadap Battalion Azov.

DAFTAR PUSTAKA

- Aljazeera. "Russia Cut \$15B Gas." Accessed April 17, 2022. Russia cut \$15B gas.
- Ariyani, Titik. "Pantas Mati-Matian Dibenci Rusia, Terungkap Batalion Azov Lakukan Kejahatan-Kejahatan Yang Sengaja Ditutupi Barat Ini." *Intisari News*, March 30, 2022. <https://intisari.grid.id/read/033211142/pantas-mati-matian-dibenci-rusia-terungkap-batalion-azov-lakukan-kejahatan-kejahatan-yang-sengaja-ditutupi-barat-ini?page=all>.
- "Division, Pre-Trial - Structure of the Court," n.d. <http://www.iccpci.com>.
- Fadhurrakhman, Faiz, Reni Windiani, and Mohamad Rosyidin. "KEJAHATAN PERANG AZOV BATTALION DALAM KONFLIK RUSIA-UKRAINA 2014: PERSPEKTIF KONSTRUKTIVIS." *Journal of International Relations Universitas Diponegoro* 3, no. 1 (January 1, 2017): 10–18. <https://doi.org/10.14710/jirud.v3i1.14581>.
- Ho, Hengky. "PENERAPAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA PALESTINA DAN ISRAEL," 2019. <https://doi.org/10.35796/les.v7i2.24668>.
- ICC. "Understanding the International Criminal Court," n.d.
- ICRC. "Military Necessity." Accessed April 18, 2022. https://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/military-necessity.
- International Criminal Court. "Situation in Ukraine." Official Organization Website, n.d. <https://www.icc-cpi.int/situations/ukraine>.
- Iyabu, Ahmad Fauzi. "Berhasil Diidentifikasi, Dua Komandan Batalion Azov Ukraina Diburu Terkait Penganiayaan Delapan Tahanan Perang Rusia," April 17, 2022. <https://voi.id/berita/155054/berhasil-diidentifikasi-dua-komandan-batalion-azov-ukraina-diburu-terkait-penganiayaan-delapan-tahanan-perang-rusia>.
- John, Tara and Lister, Tim. "A Far-Right Battalion Has a Key Role in Ukraine's Resistance. Its Neo-Nazi History Has Been Exploited by Putin." *CNN World*, March 30, 2022.

<https://edition.cnn.com/2022/03/29/europe/ukraine-azov-movement-far-right-intl-cmd/index.html>.

- Jurist Staff. "Ukraine Dispatch: Russia Wants to Put Some Captured Azov Soldiers on Trial, but They Are Ukrainian Heroes." *JURIST*, July 15, 2022.
- Kini, Kala. "Di Rostov-on-Don, Persidangan 22 "Azovites" Dimulai. Kantor Presiden Ukraina Menyebut Persidangan Ini Sebagai "kejahatan Perang." Accessed June 15, 2023. currenttime.tv.
- Laelani, Rizki. "Tindakan Sadis Azov Neo-Nazi Yang Diakui Terlarang Tapi Dibiarkan Barat-AS Bahkan Dipersenjatai Sumber Artikel Berjudul 'Tindakan Sadis Azov Neo-Nazi Yang Diakui Terlarang Tapi Dibiarkan Barat-AS Bahkan Dipersenjatai.'" *Pikiran Rakyat*, March 27, 2022. <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-014088749/tindakan-sadis-azov-neo-nazi-yang-diakui-terlarang-tapi-dibiarkan-barat-as-bahkan-dipersenjatai>.
- Morteza*, Radityo Fikri, Joko Setiyono, and Nuswantoro Dwiwarno. "PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO (COMMAND RESPONSIBILITY) DALAM KEJAHATAN PERANG OLEH BATALYON AIDAR DI UKRAINA." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (October 11, 2016): 1–20. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.13729>.
- Ravianto. "Mengenal Batalyon Azov, Jangkar Ukraina Dalam Menghadapi Gempuran Rusia, Dibentuk Raja Energi Mengenal Batalyon Azov, Jangkar Ukraina Dalam Menghadapi Gempuran Rusia, Dibentuk Raja Energi." *Tribun Jabar*, March 23, 2022. <https://jabar.tribunnews.com/2022/03/23/mengenal-batalyon-azov-jangkar-ukraina-dalam-menghadapi-gempuran-rusia-dibentuk-raja-energi>.
- "Rome Statute of International Criminal Court." International Criminal Court, July 17, 1998.
- Rony, Tommy K. "Respons Kedubes Rusia Soal Perintah Mahkamah Pidana International Yang Ingin Tangkap Vladimir Putin: Ini Tak Bisa Diterima." *Liputan6*, April 13, 2023. <https://www.liputan6.com/global/read/5259654/respons-kedubes-rusia-soal-perintah-mahkamah-pidana-international-yang-ingin-tangkap-vladimir-putin-ini-tak-bisa-diterima?page=2>.
- Sulistia, Teguh. "Pengaturan Perang Dan Konflik Bersenjata Dalam Hukum Humaniter Internasional." *Indonesian Journal of International Law* 4, no. 3 (August 12, 2021). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.3.157>.
- "Ukraine Census 2001." Accessed April 17, 2022. <http://2001.ukrcensus.gov.ua/eng/results/general/nationality/>.
- UN Press. "Alarmed by Targeted Attacks on Civilians Fleeing Violence, Massive Humanitarian Crisis in Ukraine, Speakers Briefing Security Council Reiterate Strong Calls to End Conflict." *United Nations*, March 7, 2022. <https://press.un.org/en/2022/sc14823.doc.htm>.
- Wardhana, Esnoe Faqih. "Resimen Azov Yang Menyerah Menanti Nasib, Akankah Dihukum Mati Rusia?" *SindoNews*, Mei 2022. <https://international.sindonews.com/read/776677/41/resimen-azov-yang-menyerah-menanti-nasib-akankah-dihukum-mati-rusia-1653231919>.